

**PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, SISTEM
AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH DAN PARTISIPASI PENYUSUNAN
ANGGARAN TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

*The Effect of Financial District Management, Financial Accounting System and
Budget Participation Towards Performance of Governance District
At Kabupaten Mentawai Island*

Cottalismewati; Rina Asmeri; Dica Lady Silvera

Fakultas Ekonomi Universitas Ekasakti Padang

E-mail: Cottalismewati@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pengaruh pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan partisipasi anggaran terhadap kinerja pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari responden penelitian melalui penyebaran kuesioner. Sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 55 orang.

Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Pengelolaan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan nilai signifikansi ($0,037 < 0,05$). Variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai ($0,000 < 0,05$). Variabel Partisipasi Anggaran Parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan nilai signifikansi ($0,004 < 0,05$). Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) dan Partisipasi Penyusunan Anggaran (X3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y) Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan nilai signifikansi ($0,000 < 0,05$).

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Partisipasi dalam Penganggaran, Kinerja Pemerintah Daerah, Kabupaten Kepulauan Mentawai

Abstract

This study discusses the influence of regional financial management, regional financial accounting systems and budgetary participation on the performance of the local government of the Mentawai Islands Regency.

Data processing in this research is using multiple regression model. The source of data in this study is primary data obtained directly from research respondents through distributed questionnaires. The sample taken in this study used a purposive sampling method. The number of samples in this study were 4 Regional Apparatus Organizations (OPD) as many as 55 people.

The results of the analysis of this study indicate that the Regional Financial Management variable partially has a significant effect on the Performance of the Mentawai Islands Regency Government with a significant value of ($0.037 < 0.05$). The Regional Financial Accounting System variable partially has a significant effect on the Performance of the Mentawai Islands Regency Government ($0.000 < 0.05$). The Partial Budgetary Participation Variable has a significant effect on the Performance of the Mentawai Islands Regency Government with a significance value of ($0.004 < 0.05$). Variables of Regional Financial Management (X1), Regional Financial Accounting System (X2) and Participation in Budgeting (X3) simultaneously have a significant effect on the Performance of Local Government (Y) Mentawai Islands Regency with a significant value of ($0.000 < 0.05$).

Keywords: *Regional Financial Management, Regional Financial Accounting System, and Participation in Budgeting, Regional Government Performance, Mentawai Islands Regency*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerintah daerah sekarang ini dihadapkan oleh banyaknya tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kinerja yang optimal dan segi eksternal yaitu adanya tuntutan masyarakat yang menghendaki, agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi daerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik.

Kinerja telah menjadi salah satu kata kunci yang banyak dibicarakan diberbagai organisasi mulai dari organisasi perusahaan, pemerintahan, dan juga perguruan tinggi. Demikian juga kinerja masuk dalam setiap aspek sosial ekonomi kemasyarakatan. Kondisi ini terlihat dari banyak organisasi yang memasukkan kata kinerja dalam visi dan misinya. Pencapaian kinerja tidak hanya diharapkan pada karyawan saja melainkan dalam jangka panjang diharapkan mampu meningkatkan kinerja kelembagaan.

Menurut Faisal Rachman, (2015) Kinerja menjadi gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi. Pengukuran kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi tentang efisiensi penggunaan sumberdaya dalam menghasilkan output yang berkualitas, membandingkan hasil kerja dengan rencana kerja, serta menunjuk efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Keberhasilan sebuah organisasi tidak dapat diukur semata-mata dari perspektif keuangan. Surplus atau defisit dalam laporan keuangan tidak dapat menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah karena sifat dasarnya yang tidak mencari profit, keberhasilan sebuah organisasi sektor publik juga harus diukur dari kinerjanya (Irvan: 2013).

Dalam sistem demokratisasi dalam menciptakan sebuah sistem yang *power share* setiap *level* pemerintahan serta menuntut kemandirian sistem manajemen di daerah dikenal dengan Otonomi Daerah. Otonomi Daerah memberikan otonomi yang luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal.

Pemerintahan pusat yang mengendalikan semua jalannya pemerintahan dari tingkat pusat sampai tingkat terendah daerah dan pemerintahan daerah mengemban amanat untuk menjalankan tugas pemerintah melalui perundang-undangan. Untuk itu berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah. Salah satu kewenangan pemerintah daerah dalam Undang undang tersebut adalah pengelolaan keuangan di daerah. Pemerintah daerah merupakan organ pelaksana berdasarkan undang-undang, pemerintah daerah terdiri dari berbagai lembaga yang dikenal dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Setiap OPD terdiri dari pegawai-pegawai. Dimana

pegawai yang ada dalam pemerintahan ini pun mendapat tantangan dalam melaksanakan tugas dengan mekanisme otonomi daerah.

Dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, banyak faktor-faktor yang mempengaruhi untuk melaksanakan tata kelola pemerintah yang baik (Nofianti, Leny dan Novie, 2014). Implementasi sejumlah perangkat perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah belum bisa dijadikan acuan utama dalam mewujudkan *good public governance*, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik, tetapi masih membutuhkan pengkajian yang lebih mendalam, khususnya menyangkut pengawasan, pemahaman mengenai sistem akuntansi keuangan daerah serta manajemen atau pengelolaan keuangan daerah dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Suatu organisasi sukses dalam meningkatkan kinerja, apabila sistem akuntansi keuangan daerah berjalan dengan baik dan efektif. Menurut Mardiasmo dalam Almanda (2016) menerangkan bahwa Kinerja Pemerintah Daerah akan tercapai dengan dilaksanakannya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah pun secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah, artinya sistem akuntansi keuangan daerah dapat menimbulkan dukungan yang kuat terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang dicapai.

Menurut Mardiasmo dalam Almanda (2016) Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah. Yang disebut keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai tidak hanya dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelajaran dana, tetapi sistem akuntansi keuangan daerah tersebut juga dapat mendukung pada pencapaian kinerja, penilaian pemerintahan yang baik dapat dilihat dari pencapaian kinerja pemerintahan itu sendiri, pengukuran dalam pencapaian kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan pegawai pemerintah dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Daerah mempunyai hak dan kewenangan yang luas untuk menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimilikinya sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Namun demikian, dengan kewenangan yang luas tersebut, tidaklah berarti bahwa pemerintah daerah dapat menggunakan sumber-sumber keuangan yang dimiliki sekehendaknya, tanpa arah dan tujuan yang jelas. Hak dan kewenangan yang luas yang diberikan kepada daerah, pada hakekatnya merupakan amanah yang harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan, baik kepada masyarakat di daerah maupun kepada Pemerintah Pusat yang telah membagikan dana perimbangan kepada seluruh daerah di Indonesia.

Pengelolaan keuangan daerah yang baik perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah yang baik agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Selain itu, pemahaman atas akuntansi keuangan daerah juga merupakan salah satu dimensi penting yang tidak

kalah pentingnya dalam pengelolaan keuangan daerah. Alokasi anggaran public dilakukan pengawasan dengan baik yang tercermin dalam anggaran pendapatan daerah (APBD) dapat diperuntukkan untuk kepentingan publik. Salah satu tujuannya adalah alokasi sumber daya ekonomi secara efisiensi sehingga sumber daya ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dapat dinikmati masyarakat secara optimal.

Agar akuntansi dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan roda pemerintahan, akuntansi harus dipahami secara memadai oleh penyedia informasi keuangan. Akuntansi Sebagai alat penilaian kinerja dan alat untuk mencapai tujuan pemerintah, khususnya sistem akuntansi keuangan, akuntansi diharapkan berperan dalam pengelolaan kegiatan pemerintahan dalam bentuk pengelolaan keuangan daerah berdasarkan aturan yang berlaku (Mairi, Rizani. 2014). Selama ini ada anggapan bahwa lembaga pemeriksa fungsional eksternal tidak mampu mengemban fungsinya dengan efektif, demikian juga lembaga pemeriksa fungsional intern yang berlapis-lapis pada umumnya tidak mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Pemerintah daerah merasa bahwa audit yang dilakukan terlalu banyak sehingga terjadi tumpang tindih audit finansial yang dilakukan oleh aparat pemeriksa fungsional intern maupun *ekstern*.

Salah satu alat yang digunakan instansi dalam melakukan perencanaan dan pengendalian jangka pendek dalam organisasi adalah anggaran. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang tinggi. Menurut Mardiasmo (2015) Pada sektor publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik, didiskusikan, dan diberi masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dengan uang publik. Menurut Sasongko dan Parulian (2015) Anggaran adalah rencana kegiatan yang akan dijalankan oleh manajemen dalam satu periode yang tertuang secara kuantitatif. Informasi yang dapat diperoleh dari anggaran di antaranya aktivitas pelayanan publik untuk tahun depan. Sedangkan Nafarin (2013:11), mendefinisikan bahwa "Anggaran (*budget*) merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan dalam suatu uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa".

Penyusunan anggaran merupakan suatu proses yang berbeda antara sektor swasta dan sektor pemerintah, termasuk diantaranya pemerintah daerah. Pada sektor swasta, anggaran merupakan bagian dari rahasia perusahaan yang tertutup untuk publik, namun sebaliknya pada sektor pemerintahan atau publik anggaran justru harus diinformasikan kepada publik untuk dikritik dan didiskusikan dengan tujuan untuk mendapatkan masukan. Anggaran sektor publik merupakan instrumen akuntabilitas atas pengelolaan dana publik dan pelaksanaan program-program yang dibiayai dari uang publik (Mardiasmo, 2015).

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Tahap penganggaran menjadi sangat penting, karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun.

Peran penting anggaran dalam organisasi sektor publik berasal dari kegunaannya dalam menentukan estimasi pendapatan atau jumlah tagihan atas jasa yang diberikan. Anggaran adalah sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi sektor publik untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya ke dalam kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas. Pengertian tersebut mengungkap peran strategis anggaran dalam pengelolaan kekayaan sebuah organisasi publik. Organisasi sektor publik tentunya berkeinginan memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, tetapi seringkali terkendala oleh terbatasnya sumber daya yang dimiliki.

Di dalam penyusunan anggaran, keterlibatan berbagai komponen unit kerja di suatu instansi sangat diperlukan. Dahulu penganggaran dilakukan dengan sistem *top-down*, dimana rencana dan jumlah anggaran telah ditetapkan oleh atasan atau pemegang kuasa anggaran sehingga bawahan atau pelaksana anggaran hanya melakukan apa yang telah disusun. Dalam hal ini jika penyusunan anggaran hanya berdasarkan kehendak atasan tanpa melibatkan partisipasi bawahan maka dapat menimbulkan kesulitan bagi bawahan untuk mencapainya. Sebaliknya jika penyusunan anggaran hanya disusun sesuai kehendak bawahan maka juga dapat menimbulkan rendahnya motivasi bawahan dalam mencapai target-target optimal. Keterlibatan dalam penyusunan anggaran akan sangat memungkinkan mereka memberi informasi lokal yang diketahui. Dengan cara ini, bawahan dapat mengkomunikasikan atau mengungkapkan beberapa informasi pribadi yang mungkin dapat dimasukkan dalam standar atau anggaran sebagai dasar penilaian.

Hehanusa (2013) menyatakan bahwa budaya individu sebagai variabel moderating tidak berpengaruh terhadap hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah kota dan peneliti Sarjana, Wahyuni, Ambarajaya (2012) yang menyatakan bahwa anggaran partisipatif tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja manajerial melalui motivasi kerja.

Brownell dan McInnes (1986) dalam Sarjana, dkk (2012) menunjukkan bahwa partisipasi penyusunan anggaran lebih memungkinkan para manajer (sebagai bawahan) untuk melakukan negosiasi dengan pimpinan mereka mengenai kemungkinan target anggaran yang dapat dicapai. Pimpinan yang memperkenankan bawahannya untuk turut terlibat dalam pengambilan keputusan menyangkut pekerjaannya umumnya akan meningkatkan kepuasan kerja bawahannya. Kepuasan kerja disini merupakan sikap seseorang terhadap pekerjaannya.

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan ibu kota Kabupaten Kepulauan Mentawai yang merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Mentawai. Terdapat banyak fasilitas penunjang yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menjadikannya sebagai ibu kota provinsi dengan potensi kelautan yang sangat besar. Dengan adanya letak wilayah kelautan yang besar maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagian besar retribusi daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak ditutupi berasal dari potensi kelautan. Meningkatnya pendapatan asli daerah berarti secara otomatis meningkat pula kemandirian daerah dalam membiayai pembangunannya. Peningkatan tersebut tentu saja karena pembaharuan sistem perpajakan daerah dan retribusi daerah yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif, dan efisien yang dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan

tugas pokok dan fungsi dari kantor Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sehingga dapat diketahui bahwa kinerja pemerintah daerah dalam hal ini dilihat dari pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi daerah merupakan tanggung jawab Badan Keuangan Daerah (BKD) dalam menjalankan tupoksinya.

Menurut Badan Pemeriksa Keuangan masalah yang menyebabkan lambatnya kemajuan pemerintah daerah dalam mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel terdapat dari aspek ketersediaan sumber daya manusia. Perubahan praktik akuntansi sederhana *single entry* berbasis kas yang selama ini hanya menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dan Nota Perhitungan dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah Makuda (manual administrasi keuangan daerah) menjadi praktik akuntansi *double entry* berbasis akrual yang menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, Neraca Daerah dan Catatan atas Laporan Keuangan dan menggunakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dinilainya relatif lebih rumit. Kendati relatif lebih rumit, praktik akuntansi *double entry* berbasis akrual dipandang memiliki kelebihan berupa kandungan informasi yang lebih baik kepada publik.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas dapat ditarik suatu judul usulan penelitian yang berjudul: **“Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai”**.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai?
2. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai?
3. Apakah Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai?
4. Apakah Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
3. Untuk mengetahui pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai
4. Untuk mengetahui pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Halim (2017), ruang lingkup keuangan daerah terdiri dari “keuangan daerah yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk dalam keuangan daerah yang dikelola langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan barang-barang inventaris milik daerah.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Abdul (2013: 42) Definisi dari Akuntansi Keuangan daerah adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi) yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas-entitas pemerintah daerah (kabupaten, kota, atau provinsi).

Partisipasi Penyusunan Anggaran

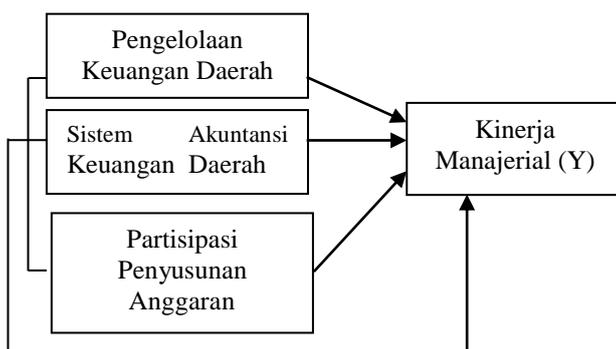
Partisipasi penyusunan anggaran sebagai suatu proses dalam organisasi yang melibatkan para anggota organisasi dalam mencapai tujuan dan kerjasama untuk menentukan satu rencana (Halim, 2013:34).

Kinerja Pemerintah Daerah

Kinerja pemerintah daerah berarti bagaimana atau sejauh mana pemerintah daerah menyelenggarakan urusan – urusan tersebut. Informasi yang digunakan untuk pengukuran kinerja dibagi dua yaitu informasi financial dan informasi nonfinancial (Sukmana dan Anggasari, 2017).

Kerangka Konseptual

Sesuai dengan telaah literatur yang telah dikemukakan di atas, dapat dikembangkan suatu kerangka teoritis yaitu sebagai berikut:



METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif, yaitu penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan. Menurut Sugiyono (2012:35), menyatakan bahwa definisi metode

deskriptif adalah sebagai berikut metode deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui keberadaan variable mandiri, baik hanya pada satu variable atau lebih (variable yang berdiri sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variable itu dengan variable yang lain. Sedangkan pengertian kuantitatif menurut Sugiyono (2012:13) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dipahami pengaruh yang ingin diketahui dalam penelitian ini yaitu Pengelolaan Keuangan Daerah (X1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2), Partisipasi Penyusunan Anggaran (X3) dan Kinerja Pemerintah Daerah (Y).

Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yaitu Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai penyusun anggaran, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai penyusun Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), Sekretariat Daerah selaku penanggungjawab dalam penyusunan anggaran dan Inspektorat sebagai pengawas.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagian jumlah subjek yang akan diteliti. Sebagaimana yang disebutkan oleh (2010:131) yang mendefinisikan sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Responden yang akan ditemui pada 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebanyak 55 (lima puluh lima) responden. Badan Keuangan Daerah (BKD) sebagai penyusun anggaran sebanyak 29 responden yaitu kepala bidang 4 orang, kepala sub bidang 25 orang. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) sebagai penyusun Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) sebanyak 12 responden yaitu kepala bidang 3 orang, kepala sub bidang 9 orang. Sekretariat Daerah selaku penanggungjawab dalam penyusunan anggaran sebanyak 9 responden yaitu asisten 3 orang, kepala bagian 6 orang. Inspektorat sebagai pengawas sebanyak 5 responden yaitu 1 orang sekretaris, 3 orang pejabat fungsional, 1 orang kasubag keuangan

Teknik Analisis Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu menganalisis pengukuran fenomena ekonomi yang merupakan gabungan antara teori ekonomi (informasi laporan keuangan), model matematika serta statistika yang diklasifikasikan dalam kategori tertentu dengan menggunakan tabel-tabel tertentu guna mempermudah dalam menganalisis dengan menggunakan program SPSS Versi IBM 20. Sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis regresi berganda, untuk melihat atau meramalkan keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih

variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya) (Sugiyono, 2012).

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program SPSS Versi IBM 20 untuk pengolahan data. Sebelumnya dilakukan terlebih dahulu uji asumsi klasik untuk memastikan agar model regresi yang digunakan tidak terdapat masalah multikolinearitas, mendeteksi tidak adanya multikolinieritas, serta data terdistribusi secara normal.

Analisis Statistik Deskriptif

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *cronbach alpha* > 0.70 (Ghozali, 2011:41-42).

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui apakah model regresi tersebut benar-benar menunjukkan hubungan yang signifikan dan representatif maka model dari uji asumsi klasik tersebut harus memenuhi asumsi klasik regresi (Ghozali, 2011:161).

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali, 2013: 160). Seperti diketahui bahwa Uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik atau uji statistik (Ghozali, 2013: 160).

2. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen (Ghozali, 2013: 105). Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2013:44). Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas..

Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah regresi linier untuk menganalisis besarnya hubungan dan pengaruh variabel independen yang jumlahnya lebih dari

dua (Sugiono, 2014: 210). Adapun persamaan model regresi berganda tersebut adalah (Sugiono, 2014: 210):

$$KPD = a + \beta_1 PKD + \beta_2 SAKD + \beta_3 PPA + e$$

Keterangan:

KPD	=	Kinerja Pemerintah Daerah
a	=	konstanta
$\beta_{1,2,3}$	=	koefisien regresi
PKD	=	Pengelolaan Keuangan Daerah
SAKD	=	Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
PPA	=	Partisipasi Penyusunan Anggaran
e	=	standar error

Metode Pengujian Hipotesis

1. Uji t

Uji t digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual dalam menerangkan variabel dependen secara parsial (Ghozali, 2016).

Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian ini menurut Ghozali (2016) adalah jika *p value* < 0,05 maka Hipotesis diterima. Sebaliknya, jika *p value* \geq 0,05 maka Hipotesis ditolak (Ghozali, 2016:44).

2. Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat (Ghozali, 2016).

Kriteria pengambilan keputusan dalam pengujian yang menggunakan *p value* atau F hitung adalah jika *p value* < 0,05 atau F hitung \geq F tabel maka Hipotesis diterima. Sebaliknya, jika *p value* \geq 0,05 atau F hitung < F tabel maka Hipotesis ditolak (Ghozali, 2016:43).

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol atau satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Dan sebaliknya jika nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen (Ghozali, 2016:58).

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Reabilitas

Secara umum suatu instrumen dikatakan reliabel jika memiliki koefisien *Cronbach's Alpha* > 0,3388. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :

Tabel 4.1
Hasil Uji Reabilitas

Variabel	CA	Item
X1	0,987	15
X2	0,973	15
X3	0,979	15
Y	0,973	15

Dari penyajian tabel diatas, maka seluruh variabel penelitian dinyatakan reliabel, dimana hasil perhitungan uji reliabilitas yang masing masing variabelnya menunjukkan *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,3388. Hal ini berarti keseluruhan variabel dapat digunakan untuk pengolahan data lebih lanjut.

Uji Normalitas

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.88675173
	Most Extreme Differences	
	Absolute	.108
	Positive	.092
	Negative	-.108
Test Statistic		.108
Asymp. Sig. (2-tailed)		.159 ^c

- a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.

Dari tabel 4.2 didapatkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, nilai ini dapat disimpulkan dari nilai sampel sebesar 55 yang berarti data yang sedang diuji berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4.3
Coefficients^a

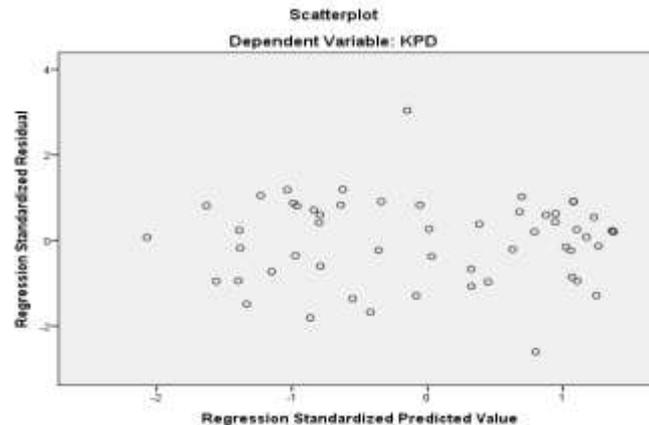
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	PKD	.343	2.919
	SAKD	.233	4.291
	PPA	.359	2.783

- a. Dependent Variable: KPD

Dari tabel 4.3 dapat disimpulkan bahwa semua variabel telah lolos dari uji multikolinieritas dikarenakan nilai tolerance besar dari 0,01 nilai VIF lebih kecil dari 10, yang berarti data yang digunakan terjadi multikolinieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.1



Dari tampilan yang terdapat pada Gambar 4.1 dapat diketahui bahwa terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar, maka indikasinya adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Regresi Linear Berganda

Tabel 4.4
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients
		B	Std. Error	Beta
1	(Constant)	2.166	3.509	
	PKD	.156	.073	.193
	SAKD	.510	.104	.535
	PPA	.301	.100	.265

a. Dependent Variable: KPD

Dari tabel di atas dapat ditarik persamaan regresinya sebagai berikut :

$$KPD = 2,166 + 0,156 PKD + 0,510 SAKD + 0,301 PPA$$

1. Nilai konstanta sebesar 2,166 hal ini menunjukkan bahwa jika variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) dan Partisipasi Penyusunan Anggaran (X3) bernilai nol maka Kinerja Pemerintah Daerah meningkat sebesar 2,166 satuan.
2. Nilai koefisien regresi variabel Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar 0,156, berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar satu satuan maka Kinerja Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar 0,156 satuan.
3. Nilai koefisien regresi variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar 0,510, berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebesar satu satuan maka Kinerja Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar 0,510 satuan
4. Nilai koefisien regresi variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran sebesar 0,301, berarti bahwa jika terjadi peningkatan variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran sebesar satu satuan maka Kinerja Pemerintah Daerah akan meningkat sebesar 0,301 satuan

Uji Koefisiensi Determinasi

Tabel 4.5
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.926 ^a	.858	.850	5.028

a. Predictors: (Constant), PPA, PKD, SAKD

b. Dependent Variable: KPD

Berdasarkan tabel diatas diperoleh angka *Adjusted R Square* sebesar 0,850 atau 85,0%, hal ini menunjukkan bahwa persentase variabel independen Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) dan Partisipasi Penyusunan Anggaran (PPA) menjelaskan variabel dependen yaitu Kinerja Pemerintah Daerah (KPD) sebesar 0,850 atau 85,0%. Sedangkan sisanya sebesar 15,0% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini..

Uji t

Tabel 4.6
Uji t
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.166	3.509		.617	.540
PKD	.156	.073	.193	2.143	.037
SAKD	.510	.104	.535	4.895	.000
PPA	.301	.100	.265	3.014	.004

a. Dependent Variable: KPD

Hasil uji t dapat dilihat pada output SPSS dari tabel 4.10. diatas bahwa Nilai t hitung dari variabel Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebesar 2.143 yang nilainya lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,007. Sehingga t hitung > t tabel dan nilai sig perhitungan yang diperoleh adalah sebesar $0,037 < 0,05$ jadi H_0 ditolak H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Maka **H_1 Diterima**.

Hasil uji t dapat dilihat pada output SPSS dari tabel 4.10 diatas bahwa Nilai t hitung dari variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah sebesar 4,895 yang nilainya lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,007. Sehingga t hitung > t tabel dan nilai sig perhitungan yang diperoleh adalah sebesar $0,000 < 0,05$ jadi H_0 ditolak H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Maka **H_2 Diterima**

Hasil uji t dapat dilihat pada output SPSS dari tabel 4.10. diatas bahwa Nilai t hitung dari variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran adalah sebesar 3.014 yang nilainya lebih besar dari nilai t tabel sebesar 2,007. Sehingga t hitung > t tabel dan nilai sig perhitungan yang diperoleh adalah sebesar $0,004 < 0,05$ jadi H_0 ditolak H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Partisipasi Penyusunan Anggaran secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Maka **H_3 Diterima**.

Uji F

Tabel 4.7
Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	7788.207	3	2596.069	102.672	.000 ^b
Residual	1289.538	51	25.285		
Total	9077.745	54			

a. Dependent Variable: KPD

b. Predictors: (Constant), PPA, PKD, SAKD

Dari tabel tersebut diketahui nilai F hitung 102.672 yang lebih besar dari nilai F tabel sebesar 4,02 dan nilai sig yang dihasilkan dari perhitungan adalah 0,000 yang lebih kecil dari α yang digunakan sebesar 5%. Dengan demikian dapat disimpulkan variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) dan Partisipasi Penyusunan Anggaran (X3) secara simultan / bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Y) Kabupaten Kepulauan Mentawai. Maka **H₄ Diterima**.

Hasil dan Pembahasan

Dari pembahasan hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah (X1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2) dan Partisipasi Penyusunan Anggaran (X3) berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rincian pembahasan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang bernilai positif berarti setiap peningkatan Pengelolaan Keuangan Daerah berdampak pada peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini diketahui dari hasil uji t dimana t hitung sebesar 2.143 lebih besar dari t tabel sebesar 2,007 dan nilai sig perhitungan 0,037 yang diperoleh kecil dari 0,05.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Winanti (2015) dimana Pemahaman Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jauharusaniah, dkk (2017) dimana Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah di Kota Tanjungpinang.

2) Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah yang bernilai positif berarti setiap peningkatan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdampak pada peningkatan

Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini diketahui dari hasil uji t yang t hitung sebesar 4,895 lebih besar dari t tabel sebesar 2,007 dan nilai sig perhitungan yang diperoleh sebesar 0,000 kecil dari 0,05.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sri Winanti (2015), Rahmad Hidayat (2015) dan Jauharusaniah, dkk (2017) dimana Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Sejalan dengan peneltian Diana, dkk (2017) bahwa Sistem Akuntansi berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah di Kota Kotamobagu.

3) Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara variabel Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang bernilai positif berarti setiap peningkatan Partisipasi Penyusunan Anggaran berdampak pada peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah. Hal ini diketahui dari hasil uji t yang t hitung sebesar 3.014 lebih besar dari t tabel sebesar 2,007 dan nilai sig perhitungan yang diperoleh sebesar 0,004 kecil dari 0,05.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jauharusaniahl dkk (2017), Nur Pitriani (2016) dan Krisna dkk (2017) dimana Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah..

4) Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Diketahui berdasarkan hasil uji F bahwa variabel Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Partisipasi Penyusunan Anggaran secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini diketahui dari hasil uji F yaitu sebesar 102.672 lebih besar dari F tabel sebesar 4,02 dan nilai sig perhitungan yang diperoleh sebesar 0,000 kecil dari 0,05.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Jauharusaniahl dkk (2017) dimana secara bersama-sama variabel Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Partisipasi Penyusunan Anggaran memiliki pengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
2. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

3. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Partisipasi Penyusunan Anggaran berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
4. Hasil pengujian secara simultan dapat diketahui bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Partisipasi Penyusunan Anggaran secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai.
5. Besarnya Adjusted R Square berdasarkan hasil analisis dengan SPSS sebesar 0,850. Adjusted R Square merupakan nilai R_2 yang disesuaikan sehingga gambarannya lebih mendekati mutu penjabakan model. Dengan demikian besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah sebesar 85,0%, sedangkan sisanya sebesar 15,0% adalah dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian

Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai agar dapat mempertahankan kinerja pemerintah daerah dengan lebih dalam memahami sistem akuntansi keuangan daerah yang ada serta penyusunan anggaran yang partisipatif
2. Untuk penelitian yang selanjutnya disarankan untuk memperluas variabel penelitian dan objek penelitian seperti pada ruang lingkup pemerintahan Provinsi yang menaungi kabupaten dan kota

Daftar Pustaka

BUKU

- Abdul Halim. 2017. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta, Salemba Empat
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit. Andi.
- Mohamad Mahsun. 2016. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE.
- Chabib Soleh dan Suripto. 2016. Menilai Kinerja Pemerintah Daerah Jatinangor: FOKUSMEDIA
- Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- Sasongko dan Parulian. 2015. Anggaran. Jakarta: Salemba Empat.
- Mardiasmo. 2015. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Penerbit ANDI
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas
- Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Arikunto, S. 2014. Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi. Revisi). Jakarta: Rineka Cipta
- Bastian Indra. 2011. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Jakarta. Salemba Empat.
- Adisaputro. 2013. Anggaran Perusahaan. BPFE-Yogyakarta, Yogyakarta.
- Nafarin, M, 2013. Penganggaran Perusahaan, Edisi 3, Salemba Empat, Jakarta.
- Nordiawan, Deddi dan Hertianti Ayuningtyas. 2010. Akuntansi Sektor Publik, Edisi 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Mahsun, Mohamad. 2012. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: BPFE
- Ikatan Akuntan Indonesia . 2012. Standar Akuntansi Keuangan. Jakart. IAI
- Abdul Halim. 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM. SPSS 19 (edisi kelima.) Universitas Diponegoro. Semarang
- Algifari. 2010. Analisis Regresi Teori, Kasus dan Solusi. BPFE . Yogyakarta
- Mardiasmo. 2010. Perpajakan Edisi Pertama Tahun 2010. Yogyakarta:Penerbit. Andi.
- Mulyadi. 2010. Sistem Akuntansi, Edisi Ketiga, Cetakan Ketiga, Penerbit Salemba. Empat, Jakarta.
- Munawir. 2010. Analisis Laporan Keuangan, Edisi 4, Liberty, Yogyakarta.

Santoso, S. 2010, Statistik Multivariat Konsep dan Aplikasi dengan SPSS, Elex. Media

Komputindo, Jakarta

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&B. Alfabeta. Bandung

Tuasikal, Askam, 2007, Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik, Vol.08, No.01, Februari 2007.

JURNAL, SKRIPSI, TESIS DAN DISERTASI

Diana Nova Lintong, David Paul Elia Saerang Ventje Ilat. 2017. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pemerintah Kota Kotamobagu. Jurnal Accountability. Volume 06, Nomor 01,

Dwi Sudaryanti (2017) "Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen Organisasi dan Sistem Akuntansi Terhadap Kinerja SKPD" (Survey pada SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan

Jauharusaniah, Tumpal Manik, Fatahurrazak. 2017. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Partisipasi Penyusunan Anggaran terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Tanjungpinang. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjungpinang

Krisna Murti Darpita Sakti. 2017. Pengaruh Penyusunan Anggaran Partisipatif Terhadap Kinerja Manajerial dengan Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Kasus SKPD Kabupaten Sleman)

Sukmana. Wawan., Anggasari., Lia. 2017. Pengaruh Pengawasan Intern Dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah

Almanda Primadona. 2016. Pengaruh Pengawasan Intern dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah.

Nur Pitriani (2016) Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Pelimpahan Wewenang Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.

Rahmat Hidayat. 2015. Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Padang Pariaman). Artikel ilmiah. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Faisal Rachman, (2015), Realisasi Jauh Meleset Kinerja Dirjen Pajak Patut Dievaluasi,

Manik, Tumpal. 2015. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anggaran Belanja

Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota dan Kabupaten di Provinsi

- Kepulauan Riau. Jurnal Ekonomi Maritim Indonesia (JEMI).Vol.6 No.2. Universitas Maritim Raja Ali Haji.
- Muthafer. 2015. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah, Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating, SNA X, Makassar
- Sri Winanti (2015) Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemahaman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelatihan, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- Mairi, Rizani. 2014. Performance Accountability of Local Government (Case study on Presentation of Performance Accountability Report and Budget Reports on Office of Management of Regional Revenue, Financial and Assets in Hulu Sungai Selatan Regency). Public Policy and Administration Research ISSN
- Nofianti, Leny dan Novie, 2014. Factors Affecting Implementation of good government governance (GGG) and their implications towards performance accountability. Procedia Social and Behavioral Sciences
- Maria Yanida,. Made Sudarma,. Aulia Fuad Rahman. 2013. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 4, Nomor 3, Desember 2013.
- Mongeri. 2013. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Daerah Kota Padang)
- Hehanusa. 2013. Pengaruh hubungan partisipasi penyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah kota di moderasi budaya individu.
- Saefulloh, Irvan (2013) Pengaruh partisipasi penyusunan anggaran dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah (survey pada Dinas Pemerintah Kabupaten Subang).
- Sarjana, Wahyuni, Ambarajaya. 2012. Pengaruh anggaran partisipatif terhadap kinerja manajerial dimoderasi motivasi kerja.
- Fawzi, Anggi. 2012. Pengaruh Pengawasan Intern dan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kinerja Pemerintahan(Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Tasikmalaya). Jurnal. Universitas Siliwangi. Siliwangi.
- Halim, A., dan Rohman. 2012. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei PadaPemda Di Jawa Tengah).Jurnal Akuntansi & Bisnis Vol.9 No.1 ISSN 1412-0852.Universitas Diponegoro. Semarang.
- Purwandani. 2012. Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah
- Nurani, Heni dan Sumiyati, Euis Eti, 2011. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survey

- pada Pemerintahan Daerah di Jawa Barat), Jurnal Penelitian: Universitas Jenderal Achmad Yani, Jawa Barat.
- Nurcahyani, Kunwafiyani. 2010. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Melalui Komitmen Organisasi Dan Persepsi Inovasi Sebagai Variabel Intervening”
- Nanda, Hapsari. 2010. Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi dan Locus Of Control Sebagai Variabel Moderating.
- Abdul. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan Dan Kinerja Pemerintah Daerah
- Rohman, Abdul. 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi, Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah Daerah (Survei pada Pemda di Jawa Tengah) Jurnal Akuntansi dan Bisnis (JAB) Vol 9, No 1 (2009)
- Wawan dan Lia. 2009. Pengaruh pengawasan intern dan pelaksanaan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah
- Adrianto, Yogi. 2008. Analisis Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Kepuasan Kerja, Job Relevant Information Dan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Moderating. Diponegoro University. Institutional Repository.
- Halim, A., dan Rohman. 2008. Pengaruh Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah dan Fungsi Pengendalian Intern terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Jurnal Maksi Vol7 No.2. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hendri, Febri. 2008. Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Sleman Di Yogyakarta)
- Latifah, Lyna dan Sabeni, Arifin. 2007. Faktor Keprilakuan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta). Simposium Nasional Akuntansi X. Makasar. 2007. ASPP-13.
- Abdullah, Syukriy, Abdul Halim, 2006, Studi atas Belanja Modal pada Anggaran Pemerintah Daerah dalam Hubungannya dengan Belanja Pemeliharaan dan Sumber Pendapatan, Jurnal Akuntansi Pemerintah, Volume 2 No. 2, November.
- Zulfikar, Morinda Goestin. 2005. Pengaruh Pelimpahan Wewenang Terhadap Hubungan Antara Kinerja Dan Partisipasi Dalam Penyusunan Anggaran (Studi Empiris Pada Rumah Sakit Di Kotamadya Surakarta). Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol.4, No.2, September 2005, hal:156-173.